

**CASH BUDGET PLANNING AND ITS REALIZATION IN SETTLEMENT AREA MAGELANG DISTRICT IN 2019**

<sup>1</sup>Nur Laila, <sup>2</sup>Risma Wira Bharata

<sup>1,2</sup> Universitas Tidar

Email : <sup>1</sup> [nurlaella745@gmail.com](mailto:nurlaella745@gmail.com), <sup>2</sup> [rismawirab@untidar.ac.id](mailto:rismawirab@untidar.ac.id)

**ABSTRACT**

*This study aims to explain the cash budget planning and Statement of Budget Realization Areas at the Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) in Magelang District. This study uses qualitative and data obtained from interviews and direct observation to the staff of the financial section at the office of the Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Magelang Regency. The results showed the cash budget preparation process at the DPRKP which was guided by the Budget Implementation Document (DPA) did not differ much from its budget realization report, so it could be said that the budget preparation was effective and efficient.*

**Keywords :** *Cash Budget, Statement Of Budget Realization, DPA*

**PERENCANAAN ANGGARAN KAS DAN REALIASINYA PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPRKP) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perencanaan anggaran kas dan Laporan Realisasi Anggaran di bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan kualitatif dan datanya diperoleh dari wawancara dan observasi secara langsung kepada staf bagian keuangan pada kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan proses penyusunan anggaran kas pada DPRKP yang berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak berbeda jauh dari Laporan Reanlisasi nggarannya, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penyusunan anggaran sudah efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Anggaran kas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## PENDAHULUAN

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam UU Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang direvisi oleh UU Nomor 33 Tahun 2004. Sejak itu, terjadi beberapa perubahan yang mendasar di dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan manajemen keuangannya. Perubahan tersebut antara lain pada perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian pengelolaan keuangan dan anggaran daerah, serta membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Salah satu bagian penting dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah adalah perencanaan dan penganggaran daerah. Bagian ini tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Agar berjalan baik, sebaiknya penganggaran tidak mengganggu proses perencanaan dan perencanaan perlu mempertimbangkan ketersediaan dana serta kelayakan ekonomi agar realistis. Perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berisi mengenai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan dengan unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah (*UU RI No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*).

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) merupakan salah satu bagian dari Pemerintah Kabupaten Magelang yang bergerak dalam bidang pembangunan sarana prasarana Pemerintah. Dinas tersebut membantu pemerintah dalam kesejahteraan masyarakat khususnya dalam salah satu kebutuhan pokok yaitu papan seperti membangun permukiman dan perumahan, membantu memperbaiki jalan rusak, membantu menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh dll, sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dinas tersebut melakukan perencanaan anggaran kas dan bagaimana realisasinya melihat bahwa kegiatan pembangunan biasanya membutuhkan biaya yang besar. Dalam melakukan aktivitasnya DPRKP membutuhkan anggaran yang akan digunakan untuk membiayai biaya operasional secara rutin tiap bulan. Anggaran merupakan rencana kerja yang dibuat secara sistematis dan formal serta dinyatakan dalam satuan uang. Anggaran tidak hanya merupakan sebuah rencana keuangan yang dibuat untuk menetapkan biaya dan pendapatan di masa yang akan datang dalam suatu pemerintahan saja, akan tetapi anggaran juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan atau pemerintahan (Basri, 2013). Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang sendiri memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) digunakan sebagai acuan dalam menetapkan pengeluaran anggaran kas untuk setiap triwulannya dan DPRKP khususnya Bidang Kawasan Permukiman dalam merencanakan perencanaan anggaran kas juga diharuskan mengacu dan berpedoman pada DPA, selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Sehingga penulis melakukan penelitian ini untuk menganalisis perencanaan anggaran kas dan laporan realisasi anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang Tahun 2019.

Penyusunan laporan realisasi anggaran sebagai bagian penting di suatu instansi yang bergerak di bidang jasa dan non jasa baik swasta maupun pemerintah. Laporan realisasi anggaran sangat berguna untuk menyediakan informasi kepada para pengguna laporan mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan anggaran APBD/APBN yang telah ditetapkan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengguna laporan mengetahui apa yang akan dilakukan pada perencanaan proses laporan untuk berikutnya. Laporan realisasi anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, surplus/deficit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, (PSAP NO 02 PAR 09). Pengelolaan keuangan sangat penting dilakukan di DPRKP Kabupaten Magelang agar anggaran ditetapkan untuk membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan (Eryandi, 2011). Dalam kaitannya dengan penetapan anggaran tidak terlepas dari biaya-biaya yang berhubungan dengan program yang akan dilakukan oleh DPRKP Kabupaten Magelang. Semua program membutuhkan biaya untuk menunjang program dari DPRKP Kabupaten Magelang, untuk itu dibutuhkan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai untuk kebutuhan tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Anggaran Kas

Menurut Nafarin (2009:12) dalam Damayanti (2017) Anggaran sebagai suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009:61) dalam

Irwadi (2015). Menurut Halim (2007:164) dalam Dewanti (2016) Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk satu periode dan periode anggaran biasanya dalam jangka waktu satu tahun. Anggaran kas menurut Husein Umar (2005, 127), anggaran kas menunjukkan rencana sumber dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang terdiri dari rencana penerimaan dan pengeluaran kas.

### **Pengetian Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya (Rustiadi 2008:339) dalam Damayanti (2017). Sedangkan menurut Kartadinata (2006:17) Perencanaan merupakan sesuatu yang mendasar dalam proses manajemen. Perencanaan suatu proses yang akan membuat perusahaan peka dalam pengertian mampu menyesuaikan diri, terhadap ancaman-ancaman dan kesempatan-kesempatan yang ada. Mardiasmo (2009:63) dalam Irwadi (2015) Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang akan dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja tersebut.

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Basri, 2013)

### **Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran. Alokasi anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dialokasikan dan alokasi anggaran belanja disebut allotment. Dokumen pelaksanaan anggaran di pemerintah pusat disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sedangkan di pemerintah daerah disebut Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD). (Ni Wayan, 2015)

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif merupakan jenis data yang berupa penjelasan atau hasil jawaban kuesioner, yang diboboti dengan angka-angka sesuai dengan skala pengukuran yang digunakan (Chandradarin, Grahitia:2018). Metode kualitatif dilakukan dengan menggunakan data untuk menerangkan suatu penjelasan dari angka-angka kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk uraian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian adalah dengan data primer yaitu, melakukan wawancara dan obeservasi secara langsung dengan pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) yaitu kepala bidang, PPTK (Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan) dan Kasir Pengeluaran di Bidang Kawasan Permukiman khususnya mengenai perencanaan anggaran kas yang sudah ditetapkan dalam merencanakan sebuah kegiatan. Selain melalui wawancara langsung juga dengan kepustakaan, yang mengacu dari referensi jurnal-jurnal terdahulu.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

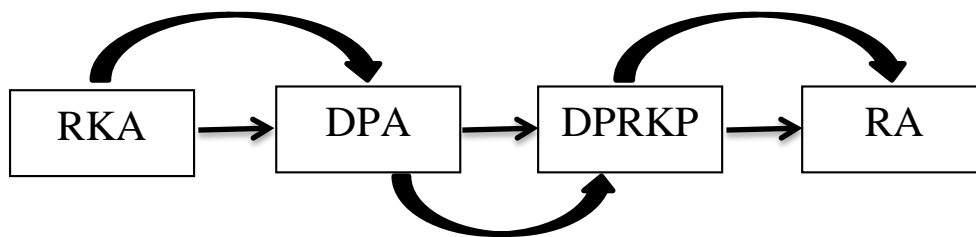
Pelaksanaan penelitian ini bertempat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 9, Patran Sawitan, Mungkid, Magelang Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Januari sampai dengan 13 Februari 2020 Penelitian ini penulis lakukan untuk memperoleh data informasi mengenai Perencanaan Anggaran Kas dan Realisasinya di Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses Perencanaan Anggaran Kas

Anggaran kas merupakan gambaran rancangan pengeluaran dan penerimaan kas selama satu periode tahun anggaran yang di bagi dalam bentuk triwulan. Berdasarkan Perda APBD yang telah disahkan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang menyusun rancangan anggaran berdasarkan rancangan DPA-SKPD yang telah dibuat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang menyusun rancangan anggaran kas per triwulan dalam satu tahun periode anggaran dengan batas Platfrom anggaran kas juga dibuat dengan melihat anggaran tiap kegiatan dalam DPA-SKPD. Rancangan anggaran kas SKPD menggambarkan besaran pengeluaran anggaran atau realisasi anggaran dan target penerimaan tiap bulannya.

Anggaran kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang disusun setiap tahunnya. Sasaran dari kegiatan Penyusunan anggaran kas tersebut untuk memastikan bahwa anggaran ini dapat direncanakan, dijalankan dan diawasi secara efisien dan efektif. Penyusunan anggaran kas yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja dapat diukur melalui tahapan siklus anggaran sesuai prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam penyusunan anggaran kas, DPRKP khususnya Bidang Kawasan Permukiman dituntut untuk melakukan perencanaan terhadap penggunaan kas. Di dalam melakukan perencanaan terhadap penggunaan kas, DPRKP menerapkan suatu konsep yang dapat dilihat pada bagan berikut :



**Gambar 1.**Proses perencanaan penggunaan kas DPRKP

Berdasarkan bagan di atas, Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disetujui oleh Pemerintahan Daerah akan diterbitkan dalam sebuah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tercantum ketentuan presentase mengenai jumlah yang harus dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Magelang untuk setiap triwulan. Anggaran kas yang disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mencakup rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja langsung program dan per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) itu sendiri telah menetapkan besaran presentase yang harus dicapai dalam setiap program kerja dan dalam perhitungannya berdasarkan jangka waktu yaitu : Triwulan I sebesar 18%, Triwulan II sebesar 30%, Triwulan III sebesar 32 %, Triwulan IV sebesar 20 %.

Tahap-tahap penyusunan perencanaan anggaran kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut: (1). Pihak-pihak yang menyusun anggaran kas adalah sekretaris, bendahara yang diketahui dan ditunjuk dalam kegiatan fasilitasi dan penataan kawasan permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang. (2). Bendahara membuat daftar perencanaan kas yang digunakan untuk kegiatan operasional kegiatan fasilitasi dan penataan kawasan permukiman. (3). Berdasarkan perencanaan anggaran, maka bendahara membuat daftar anggaran penerimaan dan pengeluaran yang datanya berasal dari informasi-informasi mengenai sumber kas dan kebutuhan operasional melalui laporan pertanggungjawaban tahun lalu. (4). Setelah selesai menyusun estimasi pengeluaran dan penerimaan kas bendahara pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman membuat laporan anggaran kas yang nantinya disetujui oleh kepala bidang kawasan permukiman. (5). Kemudian laporan anggaran tersebut diserahkan kepada kepala seksi bidang pengembangan kawasan permukiman untuk digunakan dalam kegiatan operasionalnya. (6). Pelaksanaan anggaran, disusun setiap bulan dalam satu tahun periode dan dirinci menjadi periode bulanan.

Berdasarkan uraian diatas,Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang dalam penyusunan anggaran kas yaitu dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja dan juga berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) .

**Tabel 1: Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Penetapan	Perubahan	(Rp.)	(%)
5	<b>Belanja</b>	<b>10.799.195.675,00</b>	<b>9.278.067.245,00</b>	<b>-1.521.128.430,00</b>	<b>-14,09</b>
5.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.162.935.000,00</b>	<b>2.162.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	2.162.935.000,00	2.162.935.000,00	0,00	0,00
5.2	<b>Belanja Langsung</b>	<b>8.636.260.675,00</b>	<b>7.115.132.245,00</b>	<b>-1.521.128.430,00</b>	<b>-17,61</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	367.208.000,00	479.291.000,00	112.083.000,00	30,52
5.2.2	Belanja Barang & Jasa	2.912.217.675,00	2.616.251.245,00	-295.966.430,00	-10,16
5.2.3	Belanja Modal	5.356.835.000,00	4.019.590.000,00	-1.337.245.000,00	-24,96
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>-10.799.195.675,00</b>	<b>-9.278.067.245,00</b>	<b>-1.521.128.430,00</b>	<b>-14,09</b>

Sumber : *www. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang (2019)*

Berdasarkan tabel yang disajikan terlihat bahwa Belanja yang sudah direncanakan anggaran kasnya oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) sebesar Rp 10.799.195.675,00 ternyata untuk realisasinya hanya sebesar Rp 9.278.067.245,00 yang berarti menurun sebanyak 14% dari yang direncanakan, sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung sendiri yang sudah direncanakan anggaran kasnya oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) sebesar Rp 2.162.935.000,00 untuk realisasinya juga sebesar Rp 2.162.935.000,00, untuk Belanja Langsung yang sudah direncanakan anggaran kasnya oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Rp 8.636.260.675 sedangkan pada realisasinya sebesar Rp 7.115.132.245,00 yang berarti persentasenya sebesar 17,61%. Realisasi dari Dokumen pelaksanaan anggaran tersebut sebesar Rp 6.211.016.810,00 yang berarti hanya mampu menyerap sebesar 87,29%.

Lebih lanjut lagi mereka menjelaskan mengenai penyerapan anggaran riil yang tidak sesuai dengan pedoman anggaran kas dengan pola 18%-30%-32%-20% untuk triwulan I sampai dengan IV disebabkan oleh: (1). Pola pelaksanaan pekerjaan bangunan yang dalam perencanaan sipil dikenal sebagai grafik kurva -S, di mana pada masa-masa awal pelaksanaan pekerjaan sangat sedikit namun semakin lama item pekerjaan yang dapat dilakukan dapat dilaksanakan secara bersama/paralel sehingga mendekati akhir waktu pelaksanaan maka serapan anggaran akan melonjak tinggi. (2). Pada triwulan 1 dan 2 pekerjaan yang dapat dilaksanakan sebatas persiapan, penyusunan gambar rencana, perhitungan biaya sampai dengan penyiapan lelang. Setelah dokumen siap maka akan diserahkan pada Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (ULPBJ) untuk masuk antrian lelang dan dilelangkan dengan waktu keseluruhan rata-rata selama 1-2 bulan. Dengan demikian selama triwulan 1-2 penyerapan anggaran belum terlalu banyak. (3). Pada triwulan 3, dilakukan kontrak dengan penyedia jasa pemenang lelang dan sesuai dengan peraturan dalam Pengadaan barang /Jasa Pemerintah, uang muka yang dapat diberikan sebesar 20-25% dari nilai kontrak. Bahkan untuk paket-paket dengan model penunjukan langsung (di bawah 200 juta) pembayaran sebesar 100% akan diberikan setelah selesai pekerjaan. Jadi pada triwulan 3 hanya ada serapan anggaran untuk operasional rutin kegiatan (rapat, perjalanan dinas) dan uang muka bagi penyedia jasa. (4). Pada triwulan 4, serapan akan jauh lebih besar daripada yang ditetapkan dalam rankas karena serapan senilai 75% dari nilai kontrak atau 100% nilai kontrak (untuk pekerjaan dengan metode penunjukan langsung) baru dapat dibayarkan. Ditambah dengan pembayaran bagi konsultan pengawas dan honor-honor pengelola kegiatan sehingga serapan pada triwulan 4 akan sangat besar.

Dari keempat faktor diatas terlihat bahwa ketidakmampuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang bukan karena kesengajaan melainkan disebabkan pada saat Triwulan I dan II biasanya belum masa pembangunan/belum pada tahap pengerjaan proyek tetapi masih dalam tahap gambaran pengestimasian anggaran dan hal-hal apa yang dibutuhkan untuk menjalankan program yang ada jadi belum membutuhkan begitu banyak dana. Hal tersebut karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang merupakan salah satu dinas yang melaksanakan anggaran pada bidang pembangunan infrastruktur yang ruang lingkupnya adalah membangun infrastruktur pedesaan ataupun perkotaan, jasa konstruksi jalan dan jembatan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan perencanaan anggaran kas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan dokumen pewelakuan belum mampu terserap semua. Penyusunan perencanaan anggaran kas berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang persentasenya sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar 18% untuk triwulan I, 30% untuk triwulan II, 32% untuk triwulan III dan 20% untuk triwulan IV. Dalam realisasinya untuk triwulan I dan II belum mampu menyerap semua persentase yang sudah ditetapkan oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sedangkan untuk triwulan III dan IV membengkak dari persentase yang sudah ditetapkan oleh DPA.

Kejadian tersebut terjadi bukan tanpa alasan melainkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang sendiri merupakan Dinas yang membantu masyarakat dalam menangani permukiman kumuh pembangunan rumah dll, sehingga dalam triwulan I dan II belum mampu menyerap semua anggaran dikarenakan untuk awal pembangunan belum membutuhkan banyak dana dan hanya melakukan perencanaan pembangunan dan sketsa pembangunan sehingga belum membutuhkan banyak dana sedangkan untuk triwulan III dan IV membengkak karena pada saat itu sudah memasuki tahap pembangunan dimana.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat maka saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan adalah sebagai berikut : (1). Dalam penyusunan anggaran kas bendahara pengeluaran diharapkan terlebih dahulu memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan penyusunan anggaran kas tahun sebelumnya. (2). Untuk mendapatkan suatu perencanaan kas yang baik diperlukan suatu usaha yang konsisten dari para staff yang memberikan data dan pihak yang mengolah data untuk meningkatkan akurasi perencanaan. Peningkatan kualitas/akurasi perencanaan kas sendiri adalah suatu proses belajar yang dilakukan terus-menerus yang diharapkan akan semakin baik dalam waktu yang lama. (3). Mengajukan perubahan ketetapan persentase yang ditentukan oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada Pemerintah Daerah sehingga mampu membuat Bidang Kawasan Permukiman dapat menyerap semua anggaran yang diberikan dan untuk dana lelang bisa dipisahkan untuk anggaran sendiri sehingga tidak menyebabkan adanya SILPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. (4). Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu menjelaskan lebih detail mengenai perencanaan anggaran kas dan laporan realisasi anggaran dengan data yang lebih merinci dan akurat. Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut : (1). Peneliti hanya memperoleh data anggaran kas dan data Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 saja sehingga peneliti tidak dapat menunjukkan secara langsung bagaimana perbandingan anggaran kas dari tahun sebelumnya dengan tahun berjalan. (2). Sedikitnya informasi yang diberikan oleh staff dan pegawai di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Magelang saat diwawancara. (3). Informasi yang tersedia di website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magelang masih sangat terbatas, hanya data umum yang tersedia.

### DAFTAR RUJUKAN

- Akhmad Desi Arisandi, T. R. (2018). Penyusunan Anggaran Kas Dan Realsiasi Pada UPT Panti Werdha Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Anggaran Kas DPRKP Kegiatan Fasilitasi dan Kawasan Permukiman*. (2020). [www.dprkp.magelangkab.go.id](http://www.dprkp.magelangkab.go.id)
- Azzanudin, M. I. (n.d.). Analisis Penerapan Penyusunan Anggaran Kas Terhadap Efisiensi Biaya Pada Dinas Pendidikan Kota Medan. Medan. *Jurnal*
- Basri, R. (2013). Analisis Penyusunan Anggaran Dan Laporan Realisasi Anggaran Pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara. Ramlah Basri, Analisis Penyusunan Anggaran. *Jurnal*
- Damayanti, A. (2017). Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT Perkebunan Nusantara X PG Pesantren Baru Kediri. *Jurnal*
- Dewanti, Y. R. (2016). Peranan Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Suatu Tinjauan Konseptual Atas Sistem Anggaran Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) Tangerang. *Jurnal Lentera Akuntansi*.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRKP. (2019). Kabupaten Magelang. [www.dprkp.magelangkab.go.id](http://www.dprkp.magelangkab.go.id)
- Eriyandi, V. (2011). Implementasi Perencanaan Kas Sebagai Upaya Untuk Menciptakan Realisasi Anggaran Yang Proporsi Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda Tahun Anggaran 2011. *Jurnal*
- Huler, M. D. (2016). Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penyusunan Anggaran Kas Pada Dinas Pendidikan Dan Olahraga Kabupaten Jayawijaya Papua. *Jurnal EMBA*. <http://ppid.magelangkab.go.id/>
- irwadi, M. (2015). Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada Koperasi Kopdit Rukun Palembang. *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekaya ACSY*. *Jurnal Laporan Realisasi Anggaran DPRKP*. (2019). [www.dprkp.magelangkab.go.id](http://www.dprkp.magelangkab.go.id)

- Maynisma. (2010). Analisis Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Pada PT. Indojoya Agrinusa – Unit Breeding Farm Pekanbaru . *Jurnal*
- Ni Wayan Ratna Sari, K. S. (2017). Analisis Realisasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali . *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*.  
[www.dprkp.magelangkab.go.id](http://www.dprkp.magelangkab.go.id)
- Yanti, E. F. (2012). Peranan Penyusunan Anggaran Kas Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Kas Pada Perum Pegadaian Cabang Palembang. *Jurnal*